



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN
NUNUKAN TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN
MALINAU TAHUN 2020**

**ACARA
MENERIMA DAN MENDENGAR JAWABAN TERMOHON,
KETERANGAN PIHAK TERKAIT DAN BAWASLU, MEMERIKSA
DAN MENGESAHKAN ALAT BUKTI
(II)**

JAKARTA

JUMAT, 5 FEBRUARI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2020
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020

PEMOHON

1. Danni Iskandar dan Muhammad Nasir (Perkara Nomor 49/PHP.BUP-XIX/2021)
2. Jhonny Laing Impang dan Muhrim (Perkara Nomor 66/PHP.BUP-XIX/2021)

TERMOHON

KPU Kabupaten Nunukan
KPU Kabupaten Malinau

ACARA

Menerima dan Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu,
Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti (II)

**Jumat, 5 Februari 2021, Pukul 13.38 – 15.05 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 49/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Ardiansyah Kandow
2. Damang

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 66/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Army Mulyanto
2. Michael Kanta Germansa

C. Termohon Perkara Nomor 49/PHP.BUP-XIX/2021:

Mardi Gunawan

D. Kuasa Hukum Termohon Perkara 49/PHP.BUP-XIX/2021:

Abdul Rais

E. Termohon Perkara Nomor 66/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Lasinias (Ketua KPU Kab. Malinau)
2. Bambang Rubiyanto
3. Indra Gunawan

F. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 66/PHP.BUP-XIX/2021:

Imamul Muttaqin

G. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 49/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Serfasius Serbaya Manek
2. Tabrani Abby

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 66/PHP.BUP-XIX/2021:

Adel Layde Leonard

I. Bawaslu Perkara Nomor 49/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Moch. Yusran (Ketua Bawaslu Kab. Nunukan)
2. Abd. Rahman
3. Hariadi

J. Bawaslu Perkara Nomor 66/PHP.BUP-XIX/2021

1. Donny (Ketua Bawaslu Kab. Malinau)
2. Albert Rawen
3. Suriansyah

K. Bawaslu Provinsi:

1. Suryani (Ketua Bawaslu Prov. Kalimantan Utara)
2. Fadliansyah

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.38 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua Pemohon baik yang hadir di ruang sidang maupun yang ikut melalui online Kuasa dan Prinsipalnya, ya. Termohon juga Kuasa dan Prinsipalnya baik yang diruangan ini maupun yang melalui online, KPU RI masih ... ada KPU provinsi, ya. Kemudian KPU provinsi bisa mendengar kami di sini KPU yang memilih tempat di KPU pusat, bisa mendengar suara kita ya? Baik, terima kasih Bapak. Kemudian Bawaslu sebagai pemberi keterangan, ada Bawaslu RI juga yang hadir, ya ... ini Bawaslu provinsi selamat siang Ibu-Bapak. Kemudian Pihak Terkait, Pihak Terkait Kuasa Hukum maupun Prinsipal yang di ruangan ini maupun yang ada di saluran online.

Sidang pada hari ini adalah Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Nunukan dengan Nomor Perkara 49/PHP.BUP-XIX/2021, kemudian Kabupaten Malinau dengan Nomor Perkara 66/PHP.BUP-XIX/2021 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Sebelum sidang kita lanjutkan perlu dipermaklumkan bahwa sesuai dengan protokol Covid-19 selama kita di ruangan ini dimohon agar tetap menggunakan masker dengan cara yang benar. Ini untuk kita semua bukan untuk siapa-siapa. Termohon ada bukti yang ... masih ada bukti yang mau dimasukkan? Sudah, baik. Kalau ada tambahan dimasukkan pada awal sidang agar kami bisa verifikasi untuk selanjutnya kita sahkan pada akhir persidangan. Bawaslu sudah masuk buktinya? Masih ada tambahan?

2. BAWASLU NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN

Izin, Yang Mulia.

3. KETUA: ASWANTO

Ini Bawaslu (...)

4. BAWASLU NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN

Nunukan.

5. KETUA: ASWANTO

Nunukan?

6. BAWASLU NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN

Ya, Yang Mulia.

7. KETUA: ASWANTO

Yang disampingnya?

8. BAWASLU NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: MOCH YUSRAN

Sama.

9. KETUA: ASWANTO

Kalau Nunukan satu di belakang satu di depan, Pak.

10. BAWASLU NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN

Baik, Yang Mulia.

11. KETUA: ASWANTO

Nanti Malinau juga atau sama saja? Di belakang, Pak. Kemudian ... ini jadi bingung tadi karena dipotong ini, ya. Perkara Nomor 66/PHP.BUP-XIX/2021 untuk Kabupaten Malinau, ya, jadi 2 nomor ini lakukan sidang secara bersamaan sesinya 49/PHP.BUP-XIX/2021 dan 66/PHP.BUP-XIX/2021.

Sidang untuk perkara itu kita buka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selanjutnya Yang Mulia dimohon Pak Suhartoyo untuk memimpin.

12. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih Pak Ketua. 49/PHP.BUP-XIX/2021 diperkenalkan Pemohon siapa yang hadir.

13. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ARDIANSYAH KANDOW

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kuasa Hukum Pemohon pada Perkara 49/PHP.BUP-XIX/2021 hadir di sini Damang, S.H., M.H. dan saya sendiri Ardiansyah Kandow, S.H.

14. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Yang 66/PHP.BUP-XIX/2021, silakan.

15. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: IMAMUL MUTTAQIN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Termohon KPU Kabupaten Malinau saya selaku Kuasa Hukum atas nama Imamul Muttaqin hadir bersama saya Divisi Hukum KPU Kabupaten Malinau Bapak Indra Gunawan. Hadir pula secara daring Ketua KPU Kabupaten Malinau Bapak Lasinias dan Divisi Hukum KPU Kabupaten Malinau Bapak Bambang Rubiyanto. Terima kasih, Yang Mulia.

16. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, Pemohon dulu ya sebenarnya. 66/PHP.BUP-XIX/2021 silakan Pemohon.

17. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: ARMY MULYANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Kami dari Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat Pusat DPP PDI Perjuangan dalam hal ini mewakili Pemohon Nomor Urut 2 dan yang hadir hari ini saya Army Mulyanto, S.H. dan rekan saya di belakang Michael Kanta Germansa, S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

18. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Termohon tadi 66/PHP.BUP-XIX/2021, ya, Pak? Bapak 66/PHP.BUP-XIX/2021?

19. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: IMAMUL MUTTAQIN

Ya, betul.

20. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

49/PHP.BUP-XIX/2021 Termohon, silakan.

21. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL RAIS

Bismillahirrahmaanirrahiim. Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat, saya sebagai Kuasa Termohon KPU Kabupaten Nunukan dalam Perkara Nomor 49/PHP.BUP-XIX/2021 hadir di ruangan Majelis ini bersama Anggota KPU Pak Mardi yang ada di belakang saya. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

22. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Bawaslu 49/PHP.BUP-XIX/2021, silakan.

23. BAWASLU NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: MOCH YUSRAN

Izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, saya Moch. Yusran Ketua Bawaslu Kabupaten Nunukan, hadir bersama saya Bapak Abdul Rahman selaku Kordiv Hukum Penanganan Pelanggaran dan hadir pula di zoom meeting Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara, Ibu Suryani dan Kordiv Hukum Bapak Fadli dan Kordiv PHL Kabupaten Nunukan Bapak Hariadi, kami atas Nomor Perkara Nomor 49/PHP.BUP-XIX/2021. Terima kasih, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Bawaslu Nomor 66/PHP.BUP-XIX/2021, silakan.

25. BAWASLU NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: DONNY

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Bawaslu Kabupaten Malinau, yang hadir saya Donny, selaku Ketua Bawaslu Malinau, didampingi oleh Pak Suriansyah Kordiv Hukum Bawaslu Malinau. Kemudian yang hadir secara daring, Pak Albert Rawen dan Pimpinan kami Bawaslu Provinsi Pak Fadliansyah dan Ibu Ketua Ibu Suryani. Demikian, terima kasih, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pihak Terkait Nomor 49/PHP.BUP-XIX/2021, silakan Nunukan.

**27. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021:
SERFASUS SERBAYA MANEK**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Kantor Hukum Serfasius Serbaya Manek and Associate, mewakili Paslon Nomor Urut 1, saya sendiri Serfasius Serbaya Manek, S.H., M.H, Rekan saya di belakang Tabrani Abby, S.H., M.Hum., CLA. Terima kasih, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Pihak Terkait Nomor 66/PHP.BUP-XIX/2021, silakan.

**29. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021:
ADEL LAYDE LEONARD**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Tim Advokasi Badan Hukum dan Pengamanan Partai DPP Partai Demokrat, mewakili Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 66/PHP.BUP-XIX/2021, atas nama Wempi W. Mawa dan Jakaria. Hadir di sini saya sendiri Adel Layde Leonard, S.H. Terima kasih.

30. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ibu sendirian?

**31. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021:
ADEL LAYDE LEONARD**

Ya, Pak ... Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Enggak takut? Enggak ada temannya? Yang lain ada temannya lho. Baik, supaya enggak ngantuk ya, kita enggak usah terlalu serius.

Acara hari ini adalah mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Bawaslu, dan keterangan Pihak Terkait. Masing-masing diberikan kesempatan 10 menit, giliran pertama diberikan kepada Termohon Nomor 49/PHP.BUP-XIX/2021, waktunya 10 menit, silakan.

**33. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021:
ABDUL RAIS**

Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum wr. wb.

34. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Walaikumsalam wr. wb.

**35. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021:
ABDUL RAIS**

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Perihal jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum, Kabupaten Malinau Nomor 49/PHP.BUP-XIX/2021 dan seterusnya. Yang bertanda tangan di bawah ini (...)

36. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, dianggap dibacakan itu. Eksepsinya apa?

**37. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021:
ABDUL RAIS**

Saya lanjutkan, Majelis Hakim Yang Terhormat. Dalam eksepsi. Bahwa keberatan yang menjadi dasar tuntutan yang diajukan Pemohon tersebut secara terang benderang, hanya mempermasalahkan terjadinya pelanggaran yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Dan adanya mobilisasi pemilih tambahan yang mencoblos tanpa menggunakan KTP-el, atau Suket (surat keterangan) tanpa sama sekali mempersoalkan selisih hasil penghitungan suara yang signifikan yang dapat mempengaruhi penetapan calon pemilih.

Dua. Bahwa dengan menyimak alasan-alasan yang menjadi dasar keberatan Pemohon tersebut. Dapat disimpulkan bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Pemohon merupakan bentuk-bentuk pelanggaran administrasi pemilihan yang seharusnya dilaporkan dan diselesaikan melalui Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten. Sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 139 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016.

38. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

**39. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021:
ABDUL RAIS**

Ya.

40. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Maksudnya begitu, kan?

**41. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021:
ABDUL RAIS**

Siap.

42. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apalagi keberatan Saudara eksepsinya? Kalau enggak ada lagi, langsung ke pokok permohonan.

**43. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021:
ABDUL RAIS**

Siap. Sudah. Permohonan tidak memenuhi persyaratan ambang batas minimal 2%.

44. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, Pasal 158 tidak terpenuhi?

**45. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021:
ABDUL RAIS**

Ya, bisa saya bacakan Majelis Hakim Yang Terhormat?

46. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dianggap dibacakan itu. Eksepsi yang lain lagi apa?

**47. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021:
ABDUL RAIS**

Bahwa sesuai dengan keterangan di Disdukcapil Kabupaten Nunukan dan seterusnya (...)

48. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu dianggap dibacakan.

**49. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021:
ABDUL RAIS**

Siap.

50. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu mau membacakan persentase, kan?

**51. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021:
ABDUL RAIS**

Siap, siap.

52. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dianggap dibacakan itu eksepsi.

**53. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021:
ABDUL RAIS**

Permohonan ... selanjutnya, permohonan tidak jelas obscur libel
(...)

54. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kabur (...)

**55. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021:
ABDUL RAIS**

Dikarenakan antara Posita dan Petitem yang saling bertentangan
dan adanya alternatif Petitem yang tidak sesuai dengan angka.

56. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Ada pertentangan antara Posita dan Petitem.

**57. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021:
ABDUL RAIS**

Siap, Majelis, ya.

58. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa lagi?

**59. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021:
ABDUL RAIS**

Dalam pokok perkara. Dalam pokok perkara di angka 6 bahwa permohonan Pemohon, Pemohon telah diketahui telah menyusun tujuan seolah-olah Pihak Terkait telah melakukan praktik money politics secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan memanfaatkan kewenangan dalam kegiatan pemerintah kebudayaan, antara lain berupa pembayaran tunjangan tambahan penghasilan kepada 21 pegawai, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan pada tanggal 5 Desember 2020. Pembayaran tunjangan tambahan penghasilan kepada jajaran PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan pada tanggal 7 Desember 2020, pembayaran tunjangan khusus kepada guru SD, SMP di lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan.

Dan berdasarkan tuduhan di atas, kemudian Pemohon meminta kepada Majelis Mahkamah Konstitusi agar semua surat yang diperoleh Pihak Terkait sebanyak 48.019 dinyatakan sebagai surat suara tidak sah atau nol, setidaknya-tidaknya memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di 541 TPS di Kabupaten Nunukan.

Bahwa terhadap tuduhan Pemohon yang menyebutkan Pihak Terkait selaku Bupati Petahana telah melakukan money politics dan pelanggaran yang bersifat TSM dengan pemberian tunjangan tambahan kepada seluruh PNS termasuk para guru se-Kabupaten Nunukan yang dananya bersumber dari APBK Kabupaten Nunukan akan Termohon tanggap sebagai berikut.

Pertama-tama. Perlu dipahami bersama apa yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi pemilihan berstruktur TSM dalam kontak penggelapan pemilihan kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 tahun 2019, yaitu Pasal 135A, "Pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif."

Adapun bunyi Pasal 73 ayat (2), yaitu calon terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan bahwa se-Provinsi dapat dikenakan sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Sementara itu, Pasal 73 ayat (1) dinyatakan bahwa calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materiil lain untuk mempengaruhi (ucapan tidak terdengar jelas) pemilih dan/atau pemilih.

Dari bunyi ketentuan pasal-pasal di atas dapat didefinisikan secara bebas yang dimaksud dengan TSM pada penjelasan peraturan yang dimaksud adalah terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Sistematis adalah pelanggaran yang direncanakan sangat matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan, bukan hanya sebagian-sebagian.

Selanjutnya, sesuai dengan bunyi ketentuan di atas diketahui lembaga yang berwenang untuk menangani proses pengaduan atas terjadinya bentuk- bentuk pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM adalah bahwa seluruh provinsi berikut jajaran di bawahnya, yaitu ditentukan penanganan pelanggaran administrasi pemilihan TSM menjadi kewenangan Bawaslu provinsi untuk menerima, memeriksa, memutuskan dan ... dalam waktu 14 hari dari laporan ada ... atas terjadinya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif tersebut disampaikan sejak penetapan pemilihan peserta pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara yang proses pemeriksaannya dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya 7.4. Memperhatikan uraian-uraian fakta hukum di atas, maka jika Pemohon beranggapan kebijakan pemberian TTP kepada para PNS termasuk para guru kabupaten ... sekabupaten merupakan perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai pemberian sesuatu kepada pemilih untuk mempengaruhi pemilih yang sifatnya TSM. Hal itu menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara beserta jajaran peringkat di bawahnya untuk memperoleh dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan Termohon hanya melaksanakan apa pun rekomendasi atau putusan yang nantinya dijatuhkan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara tersebut.

Namun kenyataannya hingga pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, maupun hasil perhitungan suara di tingkat kabupaten ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 16 Desember 2020 tidak pernah ada putusan dan/atau rekomendasi apa pun disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara beserta jajaran peringkat di bawahnya kepada Termohon. Khususnya atas permasalahan pemberian TTP yang dituduhkan Pemohon sebagai bentuk pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM tersebut. Padahal segala bentuk pelanggaran administrasi pemilihan yang diduga dilakukan oleh salah satu pasangan calon atau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 sesuai dengan diamanatkan pada perundang-undangan sebagaimana terurai di atas harus sudah selesai dalam masa sejak penetapan peserta pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara. Untuk lebih jelasnya nanti dapat dilihat dari keterangan yang akan disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dan/atau Bawaslu

Kabupaten Nunukan sebagai pemberian keterangan di dalam Mahkamah Konstitusi sesuai dengan diatur pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020.

Selanjutnya, selain itu tuduhan Pemohon yang menyebutkan pemberian TTP di bulan Desember 2020 tersebut memiliki unsur sebagai pemberian sesuatu kepada pemilih yang bersifat TSM, menurut hemat Termohon bersifat kabur atau tidak jelas oleh karena alasan-alasan sebagai berikut.

Menurut Per-Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 lembaga yang diberikan wewenang untuk menangani pelanggaran administrasi pemilihan bersifat TSM adalah bawaslu provinsi. Adapun objek pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM adalah unsur perbuatan atau tindakan dari calon yang menjanjikan memberikan uang atau materiil lain untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan atau pemilih secara TSM.

Untuk melaporkan telah terjadinya dugaan pelanggaran administrasi pemilihan bersifat TSM, dapat ... dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020, pelapor dapat hal ini ... pelapor dalam hal ini Pemohon diwajibkan untuk menyertakan bukti-bukti materiil diantaranya bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran yang paling sedikit 50% se-Kecamatan, se-Kabupaten Nunukan. Dalam hal ini dijelaskan oleh Pemohon dalam dalil-dalil Pemohon.

Selanjut itu juga dijelaskan Pemohon sebagaimana pemberian TTP tersebut berkorelasi dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon apakah dengan adanya pemberian TTP tersebut, maka semua PNS akan berbondong-bondong memberikan suara kepada Pihak Terkait dan apakah ada bukti berupa disposisi atau rapat atau pertemuan bahkan semua PNS yang menerima TTP diwajibkan untuk memilih Pihak Terkait. Kemudian Pemohon (...)

60. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Waktunya tinggal 2 menit. Mau baca petitum, tidak?

61. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL RAIS

Terima kasih, Majelis. Barangkali saya menginjak pada yang (...)

62. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, selajutnya dianggap dibacakan.

**63. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021:
ABDUL RAIS**

Petitem, ya. Saya langsung pada petitem, Majelis.

64. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Silakan!

**65. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021:
ABDUL RAIS**

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas mohon kepada, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pemohon ... menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak permohonan perselisihan hasil pemilihan yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan sah serta menguatkan SK KPU Kabupaten Nunukan Nomor 79/PL.02.6-Kpt/6503/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2020, berikut lampiran rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yaitu dalam Model D-hasil kabupaten/kota-KWK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan tersebut.
3. Menyatakan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut.

Nama Pasangan Calon dan perolehan suara.

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1, Hj. Asmin Laura, S.E., M.M. dan H. Hanafiah, S.E., M.Si. memperoleh suara 48.019
2. Pasangan Nomor Urut 2, H. Danni Iskandar dan Muhammad Nasir, S.Pi., M.M. memperoleh suara 45.359 suara

Total surat suara sah adalah 93.378 suara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian jawaban ini disampaikan atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami Dr. Abdul Rais, S.H., M.H. Mansuri, S.H. Anto Eko Priyadi, S.Sos. Demikian, Assalamualaikum wr. wb.

66. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Walaikumsalam wr. wb., semangat sekali Bapak ini berikan.
Baik, silakan Bawaslu tadi sudah kerjasama akan dijelaskan Bawaslu katanya. Apa yang dijelaskan?

67. BAWASLU NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: MOCH YUSRAN

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, keterangan Bawaslu akan disampaikan oleh sahabat saya Kordib. Hukum penanganan pelanggaran.

68. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kenapa Bapak ... tidak Bapak sendiri yang menjelaskan? Apa Bapak Ketua Bawaslu Bapak?

69. BAWASLU NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: MOCH YUSRAN

Berbagi Pak.

70. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ha?

71. BAWASLU NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: MOCH YUSRAN

Tanya Korbid. Hukumnya, Pak.

72. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Korbid hukum kan bukan Komisioner, Anda komisioner bukan?

73. BAWASLU NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN

Sama Pak komisioner.

74. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ha? Oh bukan ... tapi komisioner juga?

75. BAWASLU NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN

Komisioner juga.

76. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, bisa merangkap jabatan struktural, ya. Oke, silakan!

77. BAWASLU NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

78. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Waktunya ya Pak, 10 menit.

79. BAWASLU NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN

Izin. Bismilahirrahmaanirrahiim, Assalamualaikum wr. wb. Yang kami muliakan Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang kami hormati Pihak Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait. Pertama-tama, izinkan kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk menyampaikan keterangan tertulis Bawaslu Kabupaten Nunukan sehubungan dengan adanya perkara perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2020 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Desember 2020.

Keterangan tertulis Bawaslu Kabupaten Nunukan terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, keterangan terhadap pokok-pokok permohonan dan yang kedua merupakan keterangan tambahan di luar dari pokok permohonan. Kedua bagian tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keterangan Bawaslu Kabupaten Nunukan yang disampaikan pada hari ini. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan tidak secara keseluruhan melainkan resume dari keterangan Bawaslu Kabupaten Nunukan.

Majelis Hakim Yang Mulia dan hadirin yang kami hormati. Berdasarkan Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 31 dan seterusnya, tertanggal 19 Januari 2021 perihal penyampaian salinan permohonan terkait adanya perkara perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 18 Januari 2021 oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Nomor Urut 2 dengan Nomor Perkara 49/PHP.BUP-XIX/2021, maka Bawaslu Kabupaten Nunukan memberikan keterangan sebagai berikut.

1. Bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon terhadap pelanggaran money politics terstruktur, sistematis, dan masif terkait pembayaran tunjangan tambahan penghasilan kepada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan serta pembayaran tunjangan tambahan penghasilan KTP Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten Nunukan serta pembayaran tunjangan khusus DAK non fisik kepada ribuan Guru SD dan SMP di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan. Berkaitan pokok permohonan tersebut Bawaslu Kabupaten Nunukan menerangkan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa pada tanggal 22 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Nunukan mendapatkan surat pelimpahan dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara terkait dengan pelanggaran tindak pidana pemilihan. Dalam hal ini diduga Calon Bupati Nomor Urut 1 yang juga sebagai Bupati Petahana telah melakukan money politics dan memanfaatkan dana APBD Kabupaten Nunukan untuk kepentingan politik, yaitu berupa pembayaran TTP kepada Pegawai BPBD Kabupaten Nunukan. PNS di lingkungan Kabupaten Nunukan dan tunjangan khusus DAK non-fisik kepada ribuan guru SD dan SMP di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan yang dibayarkan pada tanggal 5, 7, dan 8 Desember Tahun 2020 untuk atau menjelang hari pencoblosan.

Bahwa pada hari yang sama, Bawaslu Kabupaten Nunukan melakukan registrasi terhadap dugaan pelanggaran tersebut dengan Nomor Register 10/REG/LP/TB/KAB.Nunukan/XII/2020. Kemudian pada tanggal 23 Desember 2020 dilakukan rapat pembahasan pertama oleh sentra Gakkumdu Kabupaten Nunukan yang terdiri dari unsur Bawaslu Kabupaten Nunukan, Kepolisian Desa Nunukan, Kejaksaan Negeri Nunukan membahas terkait dengan laporan tersebut. Adapun hasil rapat pembahasan pertama memutuskan untuk dilanjutkan ke tahap klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, Pihak Terkait dan Ahli.

Setelah klarifikasi dilakukan pada tanggal 27 Desember 2020, sentra Gakkumdu Kabupaten Nunukan melaksanakan rapat pembahasan kedua. Terkait hasil klarifikasi, adapun hasil rapat pembahasan kedua memutuskan bahwa laporan dengan Nomor Register 10, dan seterusnya tidak memenuhi unsur Pasal yang didugakan, sehingga dihentikan atau tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Kemudian, pada tanggal 28 Desember 2020, status laporan disampaikan kepada pelapor dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor sentra Gakkumdu Kabupaten Nunukan, Bukti PK-1.

Kedua. Bahwas berdasarkan pokok permohonan Pemohon terhadap pemilih tambahan DPTb yang tidak sah untuk menggunakan hak pilih.

Bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon terdapat 351 TPS yang memiliki hak pilih DPTb tersebar di 19 kecamatan. Sementara berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nunukan terdapat 366 TPS yang memiliki DPTb ... pemilih DPTb yang tersebar di 21

kecamatan. Berdasarkan pokok permohonan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Nunukan menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS di 351 TPS pada pokoknya Pemohon ... permohonan Pemohon terdapat pemilih DPTb yang menggunakan hak pilihnya. Adapun rekapitulasi pemilih DPTb yang menggunakan hak pilihnya sebagai berikut.

Satu. Kecamatan Nunukan.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS se-Kecamatan Nunukan terdapat pemilih DPTb sebanyak 1.671 atau 1.671 pemilih di 124 atau 124 TPS yang tersebar di 4 kelurahan dan 1 desa. Bukti PK-2.

Kecamatan Sembakung. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan TPS se-Kecamatan Sembakung terdapat pemilih DPTb sebanyak 38 atau 38 pemilih di 6 TPS yang tersebar di 3 Desa, Bukti PK-3.

Kecamatan Krayan. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS se-Kecamatan Krayan terdapat pemilih DPTb berjumlah 18 atau 18 pemilih di 3 TPS yang tersebar di 3 Desa, Bukti PK-4.

Kecamatan Sebuku. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS se-Kecamatan Sebuku terdapat pemilih DPTb berjumlah 267 pemilih di 19 TPS yang tersebar di 8 Desa, Bukti PK-5.

Kecamatan Nunukan Selatan. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS se-Kecamatan Nunukan Selatan terdapat pemilih DPTb berjumlah 432 atau 432 pemilih di 42 atau 42 TPS yang tersebar di 4 kelurahan, Bukti PK-6.

Kecamatan Sei Menggaris. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS se-Kecamatan Sei Menggaris terdapat pemilih DPTb berjumlah 192 pemilih atau 192 pemilih di 21 TPS yang tersebar di 4 Desa, Bukti PK-7.

Kecamatan Lumbis Ogong. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS se-Kecamatan Lumbis Ogong terdapat pemilih DPTb berjumlah 5 pemilih di 4 TPS yang tersebar di 4 Desa, Bukti PK-8.

Kecamatan Krayan Timur, berdasar ... bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS se-Kecamatan Krayan Timur, terdapat pemilih DPTb berjumlah 6 pemilih dari 4 TPS yang tersebar di 4 desa.

Kecamatan Krayan Barat. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS se-Kecamatan Krayan Barat, terdapat pemilih DPTb berjumlah 1 pemilih yang menggunakan hak pilihnya di 1 TPS, Bukti PK-10.

Kecamatan Lumbis Hulu. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS se-Kecamatan Lumbis Hulu terdapat pemilih DPTb berjumlah 2 pemilih di 2 TPS yang tersebar di 2 Desa, Bukti PK-11.

Kecamatan Lumbis Pansiangan. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan atau LHP pengawas TPS se-Kecamatan Lumbis Pansiangan, terdapat pemilih DPTb berjumlah 2 pemilih di 1 TPS, Bukti PK-12.

Kecamatan Tulin Onsoi. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS se-Kecamatan Tulin Onsoi, terdapat pemilih DPTb berjumlah 57 pemilih di 10 TPS yang tersebar di 6 Desa, Bukti PK-13.

Kecamatan Lumbis. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS se-Kecamatan Lumbis, terdapat pemilih DPTb berjumlah 30 atau 30 pemilih yang menggunakan hak pilihnya di 12 atau 12 TPS yang tersebar di 12 TPS, Bukti PK-14.

80. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Berapa halaman resume Saudara itu?

81. BAWASLU PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN

Kecamatan Sembakung Atulai (...)

82. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Resume Saudara berapa halaman?

83. BAWASLU PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN

Siap.

84. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Resume, buat resume enggak Saudara?

85. BAWASLU PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN

Ya, Yang Mulia?

86. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Membuat resume, tidak?

87. BAWASLU PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN

Siap. Resume, Yang Mulia.

88. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Berapa halaman? Waktunya tinggal 3 menit.

89. BAWASLU PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN

17 halaman, Yang Mulia.

90. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

17 halaman.

91. BAWASLU PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN

Ya, Pak.

92. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, waktunya tinggal 3 menit. Ini ada 110 halaman keterangan Saudara ini.

93. BAWASLU PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN

Siap. Jadi saya ... dianggap dibacakan. Saya lanjutkan ke keterangan tamba ... apa ... keterangan di luar Pokok Permohonan, Yang Mulia.

94. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Silakan.

95. BAWASLU PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN

Keterangan tambahan diluar Pokok Permohonan.

a. Hasil pengawasan pungut hitung. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS se-Kabupaten Nunukan, jumlah TPS yang terdapat pemilih DPTb sebanyak 366 atau 366 TPS yang tersebar di 21 Kecamatan. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS se-Kabupaten Nunukan, terdapat 21 atau 21 TPS yang memiliki pemilih DPTb di luar dari Pokok Permohonan Pemohon, 21 TPS tersebut terdapat dalam bukti PK-22.

b. Bawaslu Kabupaten Nunukan menemukan adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan berdasarkan hasil pengawasan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas Pemilu Kecamatan Nunukan pada hari pemungutan suara tanggal 09-12-2020 ditemukan adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan di TPS 18 Kelurahan Nunukan Timur terkait dengan masyarakat yang menghalangi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya melalui jalur DPTb dikarenakan alamat yang tercantum di KTP tidak sesuai dengan alamat TPS meskipun dalam satu kelurahan yang sama.

Bahwa terhadap temuan dugaan pelanggaran tersebut, Bawaslu Kabupaten Nunukan memutuskan untuk registrasi dengan Nomor Register 11 dan seterusnya. Kemudian pada tanggal 10 Desember 2020, dilakukan rapat pembahasan pertama Sentra Gakkumdu yang terdiri dari unsur Bawaslu Kabupaten Nunukan, Kepolisian Resort Nunukan, dan (ucapan tidak terdengar jelas) Nunukan yang memutuskan untuk dilakukan klarifikasi terhadap saksi, pelaku, dan ahli. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2020, dilakukan rapat pembahasan kedua Sentra Gakkumdu dan memutuskan bahwa temuan dengan Nomor Register 11 dan seterusnya tidak memenuhi unsur pasal yang diduga, sehingga dihentikan atau tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan. Bukti PK-48.

96. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, waktunya habis.

97. BAWASLU PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN

Siap. Terima kasih, Yang Mulia. Sekian keterangan kami.

98. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dibaca penutupnya supaya (...)

99. BAWASLU PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN

Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Nunukan, ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan pada tanggal 25 Januari 2020.

Hormat kami, Bawaslu Kabupaten Nunukan, Ketua Mochammad Yusran, Anggota Abdurrahman, Anggota Haryadi. Wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum wr. wb.

100. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Walaikumsalam wr. wb. Jadi, tidak ada rekomendasi-rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti, Pak?

101. BAWASLU PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN

Siap, Yang Mulia.

102. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oleh Termohon?

103. BAWASLU PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN

Ya, tidak ada. Tidak ada, Yang Mulia. Pihak Terkait dengan yang ... apa ... yang TSM itu tidak ada karena tidak dapat diteruskan, Yang Mulia.

104. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi memang enggak ada, bukan karena kompak-kompak, ya? Tidak ada, Pak?

105. BAWASLU PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN

Ya, Yang Mulia.

106. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak ada rekomendasi yang kemudian tidak di (...)

107. BAWASLU PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN

Tidak ada, Yang Mulia.

108. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Pihak Terkait Nomor 49/PHP.BUP-XIX/2021. Silakan.

109. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: SERFASIOUS SERBAYA MANEK

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

110. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Walaikumsalam wr. wb.

111. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: SERFASIOUS SERBAYA MANEK

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat No 6 Jakarta Pusat.

Hal, keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 49/PHP.BUP-XIX/2021 Tanggal 20 Januari 2021 yang dimohonkan oleh H. Danni Iskandar dan Muhammad Nasir, S.P., S.Pi., M.M. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 dengan Nomor Urut 2. Berdasarkan permohonan tanggal 18 Desember 2020.

112. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, itu dianggap dibacakan, Pak. Langsung substansinya saja, ada Eksepsi tidak?

113. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: SERFASIOUS SERBAYA MANEK

Ada Eksepsi, Yang Mulia.

114. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Berkaitan dengan apa?

115. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: SERFASIOUS SERBAYA MANEK

Terkait (...)

116. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kewenangan?

117. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: SERFASIUS SERBAYA MANEK

Kewenangan. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

118. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terus apa lagi? Obscur libel?

119. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: SERFASIUS SERBAYA MANEK

Obscur libel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

120. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Apa lagi?

121. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: SERFASIUS SERBAYA MANEK

Selanjutnya ke Permohonan.

122. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pokok Permohonan, boleh. Apa?

123. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: SERFASIUS SERBAYA MANEK

Kami ... izinkan kami untuk rekan kami (...)

124. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Silakan.

125. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: TABRANI ABBY

Mohon izin, Yang Mulia.

126. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Silakan, Pak.

127. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: TABRANI ABBY

Assalamualaikum wr. wb.

128. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Walaikumsalam wr. wb.

129. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: TABRANI ABBY

Saya akan bacakan Pokok Permohonan yang menjadi inti-inti pokok dari per paragraf, Yang Mulia.

130. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

131. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: TABRANI ABBY

Saya akan sebutkan nomornya, kemudian isinya, dan sudah ... sudah ada beberapa yang harus saya baca penuh paragrafnya.

Pokok Permohonan Pihak Terkait dalam Perkara 49/PHP.BUP-XIX/2021. Bahwa penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana tertera adalah sudah benar.

132. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Berapa? 48.019, ya?

133. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: TABRANI ABBY

Nomor 11, ya.

134. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pasangan yang Nomor 2=45.359, ya?

135. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: TABRANI ABBY

Ya.

136. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Berkaitan dengan pemberian tunjangan tambahan, bagaimana ini respons Saudara?

137. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: TABRANI ABBY

Pemberian tunjangan tambahan penghasilan kepada PNS ASN di lingkungan Pemda Kabupaten Nunukan adalah pelaksanaan dari amanat peraturan yang berlaku dan/atau bukan money politics TSM. Pihak Terkait tidak pernah melakukan money politics TSM atau melanggar Pasal 73 dan/atau 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Alasan-alasannya adalah.

1.13. TTP berdasarkan ... dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan yang diundangkan tanggal 10 Januari Tahun 2019.

Kemudian angka 14. Pemberian perbup tersebut adalah didasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, lalu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 ... sama, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Kemudian angka 15. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Perbup Nomor 21 Tahun 2019, "Tunjangan tambahan penghasilan pegawai negeri sipil adalah tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan atas tingkat kehadiran dan pencapaian prestasi kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya selain gaji pokok, dan tunjangan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (...)

138. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, itu dibantahlah soal tunjangan itu, Pak, ya.

139. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: TABRANI ABBY

Ya.

140. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kemudian berkaitan dengan tuduhan adanya pemilih tambahan bagaimana? Ada kan Saudara membantah juga itu.

141. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: TABRANI ABBY

Saya mohon izin, Yang Mulia. Saya bacakan yang angka 19 karena itu didalilkan oleh Pemohon. Pasal 16 Perbup Nomor 21 Tahun 2019 menegaskan pemberian TTP dibayarkan setiap bulan, yaitu pada minggu pertama bulan berjalan dengan berdasarkan hitungan laporan kerja dan tingkat kehadiran pada bulan sebelumnya dengan uraian dianggap dibacakan.

142. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi untuk menambahkan bantahan berkaitan dengan tunjangan tadi itu?

143. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: TABRANI ABBY

Ya, Yang Mulia.

144. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, yang berkaitan dengan (...)

145. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: TABRANI ABBY

Kemudian izin lagi, Yang Mulia. Bahwasanya TTP adalah kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran.

146. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, itu sudah, Pak, sudah cukup.

147. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: TABRANI ABBY

Sudah semua, Yang Mulia.

148. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, sekarang dalil yang lain kan berkaitan dengan adanya tuduhan pemilih tambahan atau Bapak langsung kan Pihak Terkait tidak pernah memobilisasi pemilih ... yang mana yang Bapak atau dua-duanya, silakan.

149. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: TABRANI ABBY

Pihak Terkait tidak pernah mobilisasi pemilih dan tidak benar adanya pemilih tambahan yang tidak sah selama pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat TPS dan PPK, bahkan kabupaten tidak pernah ada keberatan dari saksi-saksi Pemohon dengan alasan poin 3, 4, semua saksi Pemohon membubuhkan tanda tangannya pada Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara TPS atau Surat Model C hasil salinan KWK. Kemudian juga saksi-saksi Pemohon menandatangani Surat Model D hasil kecamatan KWK (Bukti PT-31B).

150. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kok enggak ada bukti di keterangannya? Mana yang bukti (...)

151. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: TABRANI ABBY

Bukti PT-31B, Yang Mulia.

152. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

PT-31B, oke.

153. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: TABRANI ABBY

Nomor 34, terakhir. Bahwa saksi Pemohon benar tidak menandatangani Berita Acara Model D hasil kabupaten KWK namun demikian saksi-saksi Pemohon tersebut tidak menunjukkan alasan yang ... maupun bukti-bukti yang menjadi dasar penolakannya.

154. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, ada penolakan tidak tanda tangan, tapi alasannya tidak dijelaskan?

155. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: TABRANI ABBY

Ya. Terakhir petitum, Yang Mulia.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam pokok perkara, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar dan sah, serta tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum atau Termohon Kabupaten Nunukan Nomor 797 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020, tanggal 6 Desember Tahun 2020 berikut lampirannya sebagaimana dinyatakan Model D hasil kabupaten KWK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan tersebut. Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Demikian keterangan Pihak Terkait ini kami sampaikan atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami sampaikan terima kasih. Hormat kami Kuasa Hukum Pihak Terkait, Serfasius Serbaya Manek and associate. Dodi S. Abdulkadir, Serfasius Serbaya Manek, dan saya sendiri Tabrani Abby. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb.

156. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kuasa Hukum Pihak Terkait, selisih Prinsipal Saudara dengan Pemohon berapa suaranya? Itu kalau (...)

157. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: TABRANI ABBY

2.660.

158. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Berapa?

159. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: TABRANI ABBY

2.660

160. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

2.000?

161. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: TABRANI ABBY

2.660.

162. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Berapa persen itu?

163. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: TABRANI ABBY

28,4% kalau tidak salah.

164. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukan 2,96?

165. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: TABRANI ABBY

Kalau saya hitung 28,4, Yang Mulia.

166. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

2,84[Sic!]. Itu kalau Kuasa Hukum harus hafal yang kayak gitu-gitu karena apa (...)

167. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: TABRANI ABBY

Ada di sini di poin 4, Yang Mulia.

168. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Saya enggak tanya kalau adanya itu.

169. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: TABRANI ABBY

Mohon maaf, Yang Mulia.

170. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Maksimal mestinya berapa suara? Harus tahu itu.

171. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: TABRANI ABBY

2%, Yang Mulia.

172. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Hah?

173. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: TABRANI ABBY

2%.

174. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Maksimal mestinya 2 ... berapa maksimal persentase itu kalau dikaitkan dengan jumlah penduduk berapa mestinya selisihnya?

175. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: TABRANI ABBY

2%.

176. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, kalau dikoversi dengan angka berapa?

177. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: TABRANI ABBY

Oh, 1.900-an sekian, Yang Mulia.

178. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi ini sudah 1.900 sekian?

**179. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021:
TABRANI ABBY**

Ya.

180. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Karena 260 berarti melebihi, ya?

**181. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021:
TABRANI ABBY**

Lebih, lebih dari 2%.

182. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, kalau Kuasa Hukum harus hafal ini.

**183. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021:
TABRANI ABBY**

Ya, Yang Mulia, siap, Yang Mulia.

184. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Modalnya dari situ, modal-modal yang lain juga dari situ, kalau enggak hafal. Oke.

**185. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021:
TABRANI ABBY**

Terima kasih, Yang Mulia.

186. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sebelum saya kembalikan ke Pak Ketua Panel, kalau ada pertanyaan satu menit saya berikan kesempatan, siapa pun Nomor 49/PHP.BUP-XIX/2021, cukup? Jangan bertanya lagi nanti, ya. Cukup, Pak Ketua. Terima kasih.

187. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Pak Daniel ada tambahan?

188. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Cukup, Yang Mulia.

189. KETUA: ASWANTO

Cukup, ya. Saya ke Panwas ya, ada klarifikasi sedikit. Ini kalau membaca permohonan dari Pemohon, misalnya tanggal 5 Desember, ya, tanggal 5 Desember itu empat hari menjelang pencoblosan dilakukan pembayaran melalui transfer ke rekening pegawai pengelola pembatasan daerah kabupaten sebanyak 21 pegawai, ada yang Rp11.000.000,00, Rp6.000.000,00, Rp5.000.000,00, Rp3.000.000,00 ini Panwas dapat laporan ndak mengenai ini?

190. BAWASLU NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN

Izin, Yang Mulia. Seperti yang saya sampaikan tadi dalam resume bahwa (...)

191. KETUA: ASWANTO

Ndak, dijawab saja, ada dapat laporan ndak?

192. BAWASLU NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN

Ya, kami dapat pelimpahan dari Bawaslu provinsi.

193. KETUA: ASWANTO

Mengenai ini?

194. BAWASLU NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN

Siap, Yang Mulia.

195. KETUA: ASWANTO

Tapi?

196. BAWASLU NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN

Tapi dia pidananya, Yang Mulia.

197. KETUA: ASWANTO

Tapi tidak dilanjutkan?

198. BAWASLU NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN

Tidak terpenuhi unsur, Yang Mulia.

199. KETUA: ASWANTO

Unsur apanya yang tidak terpenuhi?

200. BAWASLU NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN

Pasal yang diinikan. Ya, Pasal 73.

201. KETUA: ASWANTO

Anda melakukan klarifikasi enggak bahwa ini kan dari Bawaslu provinsi?

202. BAWASLU NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN

Siap.

203. KETUA: ASWANTO

Bawaslu provinsi memberi data kepada Anda, ini ada laporan.

204. BAWASLU NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN

Siap.

205. KETUA: ASWANTO

Mengenai money politics yang jumlahnya cukup banyak, gitu.

206. BAWASLU NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN

Siap, Yang Mulia.

207. KETUA: ASWANTO

Nah, lalu Anda melakukan klarifikasi enggak?

208. BAWASLU NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN

Siap, Yang Mulia. Jadi berdasarkan laporan tersebut, kami melakukan klarifikasi kepada pertama, Kepala BPBD.

209. KETUA: ASWANTO

He em.

210. BAWASLU NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN

Terus, Sekretaris BPBD. Dan Bendahara BPBD, dan kami juga melakukan klarifikasi kepada Kepala Dinas Keuangan Kabupaten Nunukan, terkait dengan laporan tersebut, Yang Mulia.

211. KETUA: ASWANTO

He em, sama dengan ini. Ada lagi? Transfer uang ... apa ... bukan transfer ini, ya, pembayaran melalui transfer rekeningnya, tanggal 7, dua hari sebelum menjelang pencoblosan. Itu TPP pegawai ASN, ini cukup banyak juga yang ditransfer, itu juga dilaporkan?

212. BAWASLU NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN

Ya, satu laporan, Yang Mulia.

213. KETUA: ASWANTO

Oh, dilaporkan juga itu, ya, satu laporan ini?

214. BAWASLU NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN

Siap, Yang Mulia.

215. KETUA: ASWANTO

Kemudian, pembayaran susulan, pembayaran tunjangan ... ini semua dilaporkan?

216. BAWASLU NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN

Siap, Yang Mulia.

217. KETUA: ASWANTO

Cuma tidak terbukti, ya?

218. BAWASLU NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN

Ya, satu kesatuan dalam laporan.

219. KETUA: ASWANTO

Satu kesatuan, ya?

220. BAWASLU NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN

Ya, buktinya di PK-1, Yang Mulia.

221. KETUA: ASWANTO

Sebentar, ada lagi yang agak menarik ini ya. Ada yang transfer pukul 04.00 WIB dini hari menjelang pencoblosan? Ada juga dilaporkan itu?

222. BAWASLU NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN

Semua satu kesatuan, Yang Mulia.

223. KETUA: ASWANTO

Ini yang mungkin namanya serangan fajar, ya. Pukul 04.00 WITA dini hari ditransfer, ini luar biasa gitu kan, ini. Pukul 04.00 WITA dini hari pada tanggal 9 itu dilakukan transfer lagi, pembayaran tunjangan, pembayaran TPP, tunjangan khusus ini dibayar, ini versinya ini, ya ... ini dalilnya Pemohon ya.

224. BAWASLU NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN

Siap.

225. KETUA: ASWANTO

Itu ditransfer pada pukul 04.00 WITA dini hari, biasa ndak apa ... ini kan Termohon, Terkait tadi, apa Terkait tahu tanggal-tanggal pembayaran karena tadi Termohon ... Terkait mengatakan itu memang rutin itu dibayar, ada ndak sebelumnya pembayaran dini hari, Subuh dini hari?

**226. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021:
SERFASius SERBAYA MANEK**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

227. KETUA: ASWANTO

Ndak, kalau Anda tidak tahu, bilang saja tidak tahu.

**228. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021:
SERFASius SERBAYA MANEK**

Pembayaran itu rutin.

229. KETUA: ASWANTO

Dini hari? Ada juga yang dini hari?

**230. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021:
SERFASius SERBAYA MANEK**

Bukan dini hari, dini hari itu otorisasi Bank BPD, itu sifatnya pemberitahuan bukan transfer.

231. KETUA: ASWANTO

Ini transfer, Pak, transfer dini hari, Pak dalilnya. Nah, kalau Anda tidak tahu ndak usah, Anda mengarang-ngarang saja. Bilang saja enggak tahu. Anda orang BPD juga?

**232. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021:
SERFASius SERBAYA MANEK**

Saya bukan orang BPD, saya Kuasanya.

233. KETUA: ASWANTO

He em.

**234. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021:
SERFASius SERBAYA MANEK**

Tapi, saya sudah mengeksplor semua data dari Prinsipal saya.

235. KETUA: ASWANTO

He em.

236. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: SERFASius SERBAYA MANEK

Terkait mekanisme pembayaran.

237. KETUA: ASWANTO

Ya.

238. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: SERFASius SERBAYA MANEK

Yang ada di ASN Kabupaten Nunukan

239. KETUA: ASWANTO

Ya.

240. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: SERFASius SERBAYA MANEK

Bahwa mekanisme pembayarannya itu bukan pukul 04.00 subuh. Tapi pihak OPD terkait menyerahkan daftar pembayaran (...)

241. KETUA: ASWANTO

Ya, ini dalilnya. Saya, kan enggak mengerti juga benar apa enggak.

242. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: SERFASius SERBAYA MANEK

Ya, ya.

243. KETUA: ASWANTO

Ini dalilnya Pemohon, transfer itu dilakukan ... transfer itu, kan ada jam, ada menitnya. Itu transfer dilakukan pukul 04.00 dini hari. Pertanyaan saya sebelumnya ada enggak transfer jam seperti?

244. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: SERFASIUS SERBAYA MANEK

Kalau jamnya kami tidak tahu pasti.

245. KETUA: ASWANTO

Lah, ya, makanya Anda tidak tahu, jangan mengarang, gitu lah.

Baik, ini Anda bikin anu ... bikin mengarang-ngarang malah tadi saya jadi keliru 2x saya buka sidangnya.

Kita sahkan dulu bukti, sekarang Termohon memasukkan bukti T-1 sampai T-60, Pak, ya?

Ya, ini Termohon sudah koordinasi sama Bawaslu tadi sehingga Termohon mengatakan nanti dengar saja jawabannya Bawaslu? Sudah koordinasi, Pak, sebelumnya? Tadi, kan waktu Anda menyampaikan jawaban Anda, Anda memperjelas ini tidak benar ini tidak benar, nanti dengar saja jawaban Bawaslu.

Bahwa?

246. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL RAIS

Bahwa tetap pelanggaran itu diselesaikan oleh Bawaslu, bukan kewenangan KPU.

247. KETUA: ASWANTO

Ya, maksud saya, Anda sudah tahu enggak sudah koordinasi enggak bahwa ini isinya.

248. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL RAIS

Oh, tidak.

249. KETUA: ASWANTO

Oh, tidak.

250. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL RAIS

Tidak. Enggak boleh itu, Majelis.

251. KETUA: ASWANTO

Tidak boleh, ya.

252. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL RAIS

Ya.

253. KETUA: ASWANTO

Tapi Anda mengatakan dengar saja nanti anu dengar (...)

254. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL RAIS

Ya, karena saya merilis normatif undang-undang dan peraturan seperti itu.

255. KETUA: ASWANTO

Ya, sudah mengerti kalau itu kita tidak bicara undang-undang. Anda, kan ngomong tadi, "Oh, itu Bawaslu nanti."

256. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL RAIS

Ya, maksud saya itu, kan jatahnya Bawaslu untuk menjawabnya bukan jatahnya kami.

257. KETUA: ASWANTO

Ya, ya, oke, lah. Saya tidak tahu Anda berkoordinasi atau tidak, cuma (...)

258. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL RAIS

Oh, tidak, Majelis.

259. KETUA: ASWANTO

Saya sampaikan saja itu enggak boleh dilakukan, ya.

260. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL RAIS

Eenggak boleh itu, Majelis, haram.

261. KETUA: ASWANTO

Baik. Saya kembali T-1 sampai T-60, betul, ya? Jangan Anda emosi.

262. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL RAIS

Siap, siap, siap, Majelis.

263. KETUA: ASWANTO

Diklarifikasi, kok, marah, gitu mukanya. Pengacara enggak boleh marah-marah, Pak.

264. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL RAIS

Ya, untuk ... sampai T-80, Majelis.

265. KETUA: ASWANTO

Ya, itu makanya. T-60 di sini kami punya. Makanya saya tanya Anda di kami (...)

266. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL RAIS

T-60, maaf, Majelis.

267. KETUA: ASWANTO

Di kami yang sudah diklarifikasi itu T-1 sampai T-60.

268. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL RAIS

Ya, 60, Majelis. Yang dimasuk (...)

269. KETUA: ASWANTO

Anda masukkan tadi T-80.

270. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL RAIS

T-60, Majelis.

271. KETUA: ASWANTO

Ya, karena Anda emosi itu. Kita klarifikasi ini, kan mencari kebenaran yang substantif ini.

272. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL RAIS

Tadi saya pakai kacamata, Majelis.

273. KETUA: ASWANTO

Jangan, Bapak, emosi, gitu, ya. Kita sahkan, ya, T-1 sampai T-60. Kemudian Pihak Terkait, ini PT-1 sampai dengan PT-31.D? Betul, ya, Pak, ya?

KETUK PALU 1X

274. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: SERFASIUS SERBAYA MANEK

Siap, Yang Mulia, sesuai.

275. KETUA: ASWANTO

Baik, kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian Bawaslu, PK-1, ya, sampai dengan PK-48?

276. BAWASLU NO 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN

Siap, Yang Mulia.

277. KETUA: ASWANTO

Baik, kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Pemohon, tidak ada tambahan, ya? Tidak ada bukti tambahan?

278. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ARDIANSYAH KANDOW

Tidak ... tidak ada, Yang Mulia.

279. KETUA: ASWANTO

Baik, selanjutnya saya kembalikan ke Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo.

280. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, supaya tidak terlalu tegang, gitu, termasuk Kuasa Hukum Termohon, silakan sudah selesai, boleh keluar. Biar agar sejuk udara di luar dan di dalam kita bisa menerapkan physical distancing dengan baik. Dan mekanisme kita selalu begitu.

Yang sudah selesai diminta keluar. Silakan semua. Sambil mempersiapkan untuk Nomor 66/PHP.BUP-XIX/2021 Termohon, silakan.

281. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: IMAMUL MUTTAQIN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, izinkan kami menyampaikan jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 66/PHP.BUP-XIX/2021. Dalam jawaban kami ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, eksepsi, bagian kedua itu dalam pokok permohonan. Dan yang ketiga, petitum. Mohon untuk yang tidak dibaca secara langsung dianggap dibacakan, Yang Mulia.

282. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, silakan.

**283. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021:
IMAMUL MUTTAQIN**

Dalam eksepsi.

A. Eksepsi tentang kedudukan hukum Pemohon yang pada intinya Pemohon tidak memiliki legal standing karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 yang mengatur ambang batas pengajuan permohonan.

B. Selanjutnya, eksepsi tentang dalil-dalil Pemohon tidak jelas atau kabur. Saya bacakan poin-poinnya saja, Yang Mulia. Yang pertama, petitum dalam permohonan Pemohon tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020. Penjelasannya dianggap dibacakan.

284. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, apalagi eksepsinya?

**285. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021:
IMAMUL MUTTAQIN**

Kemudian, masih tentang dalil yang kabur, Yang Mulia.

286. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

**287. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021:
IMAMUL MUTTAQIN**

Yang poin 2 Pemohon tidak menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon.

288. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

**289. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021:
IMAMUL MUTTAQIN**

Penjelasannya dianggap dibacakan.

290. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

291. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: IMAMUL MUTTAQIN

Kemudian, dalil pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif tidak terurai secara jelas kualifikasinya dan pengaruhnya terhadap hasil penghitungan suara.

292. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

293. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: IMAMUL MUTTAQIN

Dianggap dibacakan. Selanjutnya, kami akan membacakan pokok permohonan jawaban dalam pokok permohonan.

294. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Silakan!

295. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: IMAMUL MUTTAQIN

Bahwa apa yang terurai di dalam eksepsi mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok permohonan ini. Mohon tambahan kata jawaban, Yang Mulia.

296. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, yang mana, Pak?

297. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: IMAMUL MUTTAQIN

Yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok permohonan ini ada tambahan kata *jawaban*.

298. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Di halaman berapa itu?

**299. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021:
IMAMUL MUTTAQIN**

Halaman 5, dalam pokok permohonan.

300. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bahwa apa yang terurai di dalam eksepsi (...)

**301. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021:
IMAMUL MUTTAQIN**

Mohon dianggap.

302. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Mohon dianggap sebagai bagian?

**303. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021:
IMAMUL MUTTAQIN**

Yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok permohonan ini, Yang Mulia.

304. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dengan jawaban.

**305. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021:
IMAMUL MUTTAQIN**

Dalam pokok permohonan ini.

306. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, oke. Apa yang mau ditanggapi untuk pokok permohonannya?

**307. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021:
IMAMUL MUTTAQIN**

Bahwa terhadap dalil-dalil dalam pokok permohonan, dengan ini Termohon membantah secara tegas dan menjawab sebagai berikut.

4.1. Bantahan tentang pemilih tambahan yang memilih menggunakan KTP elektronik dan surat keterangan. Langsung pada poin 4.1.2

4.1.2. Bahwa jumlah perekaman KTP elektronik yang dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten Malinau dari sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan 9 Desember 2020 adalah sebanyak 925 orang dari total perekaman KTP elektronik tersebut sebanyak 779 perekaman KTP elektronik dilakukan oleh pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT, namun belum memiliki KTP. Sedang sisanya sebanyak 146 perekaman KTP elektronik dilakukan oleh masyarakat Malinau yang tidak terdaftar dalam DPT. Dengan demikian, kegiatan perekaman KTP elektronik yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Malinau di dominasi oleh pemilih yang memang sudah terdaftar dalam DPT dan tidak ada kaitannya dengan perekaman KTP untuk pemilih DPTb sebanyak 1.896 orang.

Fakta ini dapat diambil kesimpulan pula bahwa sebagian besar pemilih DPTb merupakan pemilih yang sudah memiliki KTP elektronik sebelum DPT ditetapkan. Bukti T-4.

308. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apalagi yang mau dibantah selain itu, itu sudah dianggap cukup?

309. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: IMAMUL MUTTAQIN

Cukup, Yang Mulia dianggap dibacakan. Selanjutnya pada poin 4.1.8 masih tentang (...)

310. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

DPTb?

311. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: IMAMUL MUTTAQIN

DPTb.

312. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Silakan!

313. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: IMAMUL MUTTAQIN

Bahwa terkait jumlah pemilih DPTb di Kecamatan Malinau Kota yang diduga telah terjadi penggelembungan suara pada atau oleh pemilih DPTb tersebut. Sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon terdapat keberatan dari saksi Paslon Nomor Urut 1 pada saat rapat Pleno

terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Malinau Kota dan telah dibacakan dan dijawab pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten. Selanjutnya mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

314. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

315. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: IMAMUL MUTTAQIN

Kemudian poin selanjutnya itu.

316. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Poin berapa?

317. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: IMAMUL MUTTAQIN

Bahwa ... 4.1.9.

318. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tentang pejabat ini bukan?

319. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: IMAMUL MUTTAQIN

Masih halaman 8, Yang Mulia.

320. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke.

321. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: IMAMUL MUTTAQIN

Bahwa tidak ada yang dapat memastikan apakah pemilih DPTb yang menyalurkan hak suaranya tersebut semuanya (...)

322. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, kepada Pemohon atau Pihak Terkait maksudnya.

**323. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021:
IMAMUL MUTTAQIN**

Betul, Yang Mulia.

324. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke.

**325. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021:
IMAMUL MUTTAQIN**

Terima kasih.

326. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terkait dengan bantahan tentang pejabat negara, bagaimana?

**327. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021:
IMAMUL MUTTAQIN**

Nah, terkait dengan bantahan tentang pejabat negara atau pejabat daerah, langsung pada poin 4.22.

Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Termohon terkait adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau adalah murni pelanggaran pidana dan atau kode etik yang masing-masing berdiri sendiri yang bersifat personal dan sporadis serta tidak ada kaitan satu sama lainnya, sehingga tidak bisa dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa tindakan tersebut adalah tindakan yang terstruktur, sistematis, dan masif.

328. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Memang ada Pak ini sebenarnya? Meskipun berdiri sendiri ada memang?

**329. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021:
IMAMUL MUTTAQIN**

Pada poin 4, 1, 2, 3 itu ada rekomendasi dari Bawaslu, Yang Mulia. Izin membacakan.

330. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke.

331. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: IMAMUL MUTTAQIN

Bahwa terkait pelanggaran pemasangan APK berupa stiker di mobil angkot dan mobil pribadi, Bawaslu Kabupaten Malinau telah memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Malinau melalui surat Nomor 430 dan seterusnya, tertanggal 30 Oktober 2020 yang pada intinya Termohon telah melakukan langkah-langkah konkret sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

332. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, sebentar Pak ... sebentar Pak. Lalu kaitan dengan yang diserahkan ke Komisi ASN gimana itu lanjutan akhirnya? Nanti Bawaslu jelaskan, ya!

333. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: IMAMUL MUTTAQIN

Masih dalam proses, Yang Mulia.

334. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya itu, dalam proses itu masa tidak ada kepastian sampai sekarang perkara sudah ... Oke.

335. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: IMAMUL MUTTAQIN

Siap, Yang Mulia.

336. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi, kalau untuk Termohon soal itu tidak bisa menjelaskan lebih lanjut karena masih proses, ya?

337. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: IMAMUL MUTTAQIN

Betul, Yang Mulia.

338. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Berkaitan dengan pemilih yang menggunakan atau mencoblos lebih dari 1 kali ini. Waktunya tinggal 3 menit.

339. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: IMAMUL MUTTAQIN

Bantahan tentang pemilih yang mencoblos lebih dari 1 kali.

340. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa bantahan Saudara?

341. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: IMAMUL MUTTAQIN

Bahwa keberatan saksi pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 di Desa Long Nawang, terkait pelanggaran oleh Camat Kayan Hulu atas nama Stim Ala[Sic!] yang mencoblos sebanyak 2 kali di TPS 1 dan TPS 2 Desa Long Nawang telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Malinau. Saat ini, KPU Kabupaten Malinau juga sedang menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota KPPS di TPS 2 Desa Long Nawang atas peristiwa tersebut.

342. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada nanti dijelaskan juga Bawaslu ini bagaimana. Hanya 1 pemilih, ya?

343. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: IMAMUL MUTTAQIN

Betul, Yang Mulia, hanya 1 pemilih.

344. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi kan tetap ada unsur pidananya, tapi gimana nanti 112 tindak lanjut dari Bawaslu ini. Sekarang bahasan tentang segel, sampul kertas.

345. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: IMAMUL MUTTAQIN

Terima kasih, Yang Mulia. Bantahan tentang segel sampul kertas yang memuat model D hasil rekapitulasi tingkat kecamatan. Perlu diketahui bahwa menjelang rapat pleno berakhir yang mengajukan keberatan tentang amplop khusus tersebut adalah Saksi Paslon Nomor Urut 1.

Poin selanjutnya. Bahwa kabupat ... KPU Kabupaten Malinau tidak menyiapkan amplop dengan desain khusus yang disediakan untuk

menyimpan formulir model D.hasil kecamatan-KWK. Adapun fakta di lapangan pada akhir rapat pleno tingkat kecamatan, petugas PPK memasukkan formulir model D.hasil kecamatan-KWK ke dalam amplop biasa atau kantong plastik yang disegel. Dan kemudian memasukkannya ke dalam kotak suara dan disegel. Serta diikat kabel ties yang juga disegel.

Demikian pula saat kotak suara dibuka dihadapan saksi Paslon dan Bawaslu, semua kotak suara masih dalam kondisi tersegel. Selain daripada ... daripada itu tidak ada aturan yang mengatur bahwa amplop harus berlogo, vide Bukti T-11.

346. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Petitum, Pak.

347. KUASA HUKUM TERMohon PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: IMAMUL MUTTAQIN

Tm. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam pokok perkara, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau Nomor 373/HK.03.1-KPT/03/6502/KPU-MAL/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malinau Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020, pukul 19.00 WITA.

Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut. Nomor Urut 1 perolehan suara 13.144 suara. Nomor Urut 2, perolehan suara 9.757 suara. Nomor Urut 3 perolehan suara 19.807 suara dengan total suara sah 42.708 suara atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon, ditandatangani. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

348. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dilanjutkan dari Bawaslu. Silakan, Nomor 66/PHP.BUP-XIX/2021.

349. BAWASLU PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: DONNY

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang kami muliakan Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang kami hormati Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait. Pertama-tama, izinkan kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk menyampaikan keterangan tertulis Bawaslu Kabupaten Malinau, sehubungan dengan adanya perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020 yang telah diajukan dan didaftarkan di kepa ... kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Desember 2020. Keterangan tertulis Bawaslu Kabupaten Malinau terdiri dari 2 bagian.

Yang pertama merupakan keterangan terkait dengan pokok permohonan Pemohon dan bagian kedua merupakan keterangan tambahan diluar pokok permohonan Pemohon. Pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan tidak secara keseluruhan, melainkan resume dari keterangan Bawaslu Kabupaten Malinau. Mohon yang tidak dibaca secara langsung dianggap sudah dibacakan.

Majelis Hakim Yang Mulia, sehubungan dengan adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020 yang telah diajukan, didaftarkan ke Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember 2020 dengan Nomor Perkara 66/PHP.BUP-XIX/2021 dan seterusnya. Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Malinau menyapaikan keterangan sebagai berikut.

A. Keterangan atas pokok permohonan.

1. Hasil pengawasan atas Pokok Permohonan mengenai peningkatan pemilih tambahan di 15 kecamatan. Bahwa terhadap Pokok Permohonan perkara a quo yang mendalilkan bahwa menurut Pemohon telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau pada Tahun 2020. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Malinau sesuai dengan hasil pengawasan pengawasan PTPS di wilayah kabupaten di wilayah Kabupaten Malinau terkait jumlah DPTb dengan jumlah yang signifikan di 15 kecamatan, hasil pengawasan PTPS se-Kabupaten Malinau disampaikan sebagai berikut.

A sampai O kami anggap sudah dibacakan. Intinya bahwa pada saat pemungutan suara di tempat pemungutan suara TPS di seluruh 15 kecamatan pada Kabupaten Malinau tidak terdapat keberatan terkait dengan DPTb oleh saksi-saksi pasangan calon.

2. Pencegahan dan penanganan pelanggaran pemilihan.

a. Keterlibatan pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, TNI, Polri, kepala desa atau lurah.

1. Terkait dengan keterlibatan pejabat negara ... pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, TNI, Polri, kepala desa/lurah Bawaslu Kabupaten Malinau menerangkan sebagai berikut.
 - a. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Malinau tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau.
 - b. Bahwa mengenai dalil Pemohon Poin a perkara a quo terkait Camat Malinau Kota atas nama Rolland Rudianto menggunakan masker dengan logo WM yang berinisial dari calon bupati pada Pilkada Kabupaten Malinau Nomor Urut 3, Bawaslu Kabupaten Malinau tidak menemukan dan mendapatkan laporan terkait hal tersebut.
 - c. Bahwa mengenai dalil Pemohon Poin 6 perkara a quo terkait kepala desa Respen Tubu Kecamatan Malinau Utara atas nama Dole Ucan pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 telah melakukan kampanye dan mendukung salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malinau Nomor Urut 3, Bawaslu Kabupaten Malinau tidak menemukan dan mendapatkan laporan terkait hal tersebut.
 - d. Bahwa mengenai dalil Pemohon Poin 6R, Poin 7 perkara a quo terkait postingan akun Facebook atas nama Lulu Purwanti yang merupakan tenaga honor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau sering melakukan kampanye untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malinau Nomor Urut 3, Bawaslu Kabupaten Malinau tidak menemukan dan mendapatkan laporan terkait hal tersebut.
2. Terkait dengan dalil permohonan mengenai keterlibatan Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau atas nama Ernest Silvanus melakukan kampanye di desa Mirau Kecamatan Malinau Selatan Hulu pada tanggal 23 Oktober 2020, Bawaslu Kabupaten Malinau menerangkan sebagai berikut.
 - a. Pada tanggal 10 November Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Malinau menerima laporan dengan Nomor 02/LP/Kab/24.02/IX/2020 dengan pelapor atas nama Faris Balang terkait adanya dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara yang dilakukan oleh terlapor atas nama Ernest Silvanus sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau melakukan kampanye untuk Pasangan Calon Bupati Wakil Bupati Nomor Urut 3 yang telah disebarakan pada situs jejaringan sosial Facebook oleh akun Peduli Bangsa. Bawaslu Kabupaten Malinau telah melakukan kajian awal meneliti keterpenuhan syarat formil dan materiil laporan bahwa Bawaslu Kabupaten Malinau menetapkan laporan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil melalui rapat pleno pada

tanggal 14 November 2020, sehingga laporan tersebut register dengan Nomor 03 dan seterusnya.

- b. Bahwa pada tanggal 15 November 2020, Bawaslu kabupaten Malinau bersama Sentra Gakkumdu melaksanakan pembahasan pertama dengan agenda menentukan dugaan pasal yang dilanggar oleh terlapor yang dituangkan dalam Berita Acara pembahasan ke 1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Malinau bersama Sentra Gakkumdu telah melakukan klarifikasi pada tanggal 17 sampai 19 November 2020 kepada pelapor, terlapor, dan saksi-saksi. Bahwa pada tanggal 19 November 2020, Bawaslu Kabupaten Malinau bersama Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan kedua untuk menentukan keterpenuhan unsur-unsur tindak pidana pemilihan pada Laporan Nomor 03 dan seterusnya bahwa dalam pembahasan kedua diperoleh kesimpulan bahwa laporan dengan Nomor Register 03 dan seterusnya belum ditemukan dua alat bukti yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP, sehingga tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan Nomor 10 Tahun 2016.

350. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu yang berkaitan apa, Pak?

351. BAWASLU PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: DONNY

Netralitas ASN sekda.

352. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, yang langsung ... yang berkaitan dengan ... yang diteruskan ke Komisi ASN?

353. BAWASLU PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: DONNY

Selanjutnya dibacakan.

354. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, waktunya tinggal 3 menit, Pak.

355. BAWASLU PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: DONNY

Baik. Saya lanjutkan.

Bahwa kita merekomendasikan ... bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Malinau kepada KSN telah diterima tembusan putusan dari KSN dengan Nomor R-44 dan seterusnya perihal rekomendasi atas pelanggaran netralitas ASN, Saudara Ernes Silvanus, pada tanggal 19 November 2020 dengan sanksi hukuman disiplin sedang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

356. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Seharusnya disiplin sedang, ya. Ini hukuman yang dijatuhkan KASN?

357. BAWASLU PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: DONNY

Benar.

358. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, yang terakhir soal pemilih yang dua kali itu.

359. BAWASLU PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: DONNY

Tiga. Bahwa terhadap pokok permohonan a quo yang mendalilkan bahwa Camat Kayan Hulu atas nama Stim Ala pada tanggal 9 Desember 2020 diduga melakukan pencoblosan sebanyak 2 kali dengan menggunakan Formulir C undangan KWK di TPS 2 Desa Long Nawang dan menggunakan KTP elektronik di TPS 1 Desa Long Nawang, Bawaslu Kabupaten Malinau menerangkan sebagai berikut.

- a. Berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas TPS 1, pengawas TPS 2 Dewa Long Nawang tidak terdapat keberatan.
- b. Bahwa berdasarkan informasi awal yang telah diterima Bawaslu Kabupaten Malinau melakukan penelusuran terhadap adanya dugaan pelanggaran tersebut ke Kecamatan Kayan Hulu Desa Long Nawang, seterusnya.
- d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Malinau melakukan proses penanganan pelanggaran sebagai berikut. Tanggal 19 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Malinau meregistrasi temuan dengan Nomor 03, seterusnya terkait dugaan pelanggaran oleh Camat Kayan Hulu.

Selanjutnya bahwa berdasarkan temuan dengan Nomor Register 03 dan seterusnya Bawaslu Kabupaten Malinau menindaklanjuti dengan melakukan pembahasan ke satu ... sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Malinau untuk menemukan peristiwa pidana pemilihan mencari,

mengumpulkan bukti-bukti, serta menentukan pasal yang akan disangkakan terhadap peristiwa yang ditemukan.

360. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, akhirnya bagaimana itu yang (...)

361. BAWASLU PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: DONNY

Terkait dengan pidana dihentikan, kemudian direkomendasikan ke KASN, sudah keluar putusan KASN-nya walaupun tidak dituangkan dalam ini baru keluar kemarin peringatan keras.

362. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Untuk camat ini?

363. BAWASLU PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: DONNY

Ya.

364. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Berarti terbukti, ya?

365. BAWASLU PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: DONNY

Netralitasnya.

366. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukan 2 kalinya?

367. BAWASLU PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: DONNY

Pidananya karena Sentra Gakkumdu, Pak, ada 3 lembaga yang (...)

368. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, kan ada unsurnya ada di situ Bawaslu, Gakkumdu-nya?

369. BAWASLU PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: DONNY

Benar, Pak.

370. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa putusan soal pidananya 112?

371. BAWASLU PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: DONNY

Izin bisa teman saya yang menjelaskan?

372. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jelaskan, Pak. Jelaskan, Pak.

373. BAWASLU PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: DONNY

Silakan.

374. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Waktunya habis ini, jelaskan dulu.

**375. BAWASLU PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021:
SURIANSYAH**

Terima kasih, Yang Mulia.

376. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Maju depan saja tidak apa-apa.

**377. BAWASLU PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021:
SURIANSYAH**

Karena terkait waktu penanganan pelanggaran sudah habis karena untuk akses kita ke Kayan Hulu itu naik pesawat. Itu, Yang Mulia.

378. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Di kecamatan itu?

**379. BAWASLU PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021:
SURIANSYAH**

Ya. Jadi untuk rekomendasi ke KASN-nya itu ditindaklanjuti sudah keluar (...)

380. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Lho, kan ada panwascam kan? Kenapa harus kesulitan transportasi. Kalau itu kejadiannya di Kecamatan Long apa?

381. BAWASLU PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: SURIANSYAH

Kayan Hulu.

382. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Long apa namanya?

383. BAWASLU PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: SURIANSYAH

Kecamatan Kayan Hulu.

384. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu apa kedaluwarsa karena enggak bisa menjangkau kesulitan transportasi kan bisa di-delivery melalui kecamatan sebenarnya yang membawahi langsung baru nanti secara berjenjang dilaporkan ke atas. Bagaimana?

385. BAWASLU PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: SURIANSYAH

Ya, baik, Yang Mulia. Di dalam penanganan pelanggaran kita mengklarifikasi terhadap terlapor makanya kita terkendalanya di akses pesawat karena di Kabupaten Malinau di akhir Desember itu (...)

386. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, itu terlalu formalistik dan kemudian sebenarnya kan di-deliver ke panwas untuk klarifikasi terlapor, terlapor kalau itu wilayahnya sulit dijangkau kan untuk apa masing-masing kecamatan disediakan ... nanti baru secara berjenjang hasil ... jadi kedaluwarsa karena alasan transportasi, sehingga untuk pidananya camat ini tidak diproses, ya?

387. BAWASLU PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: SURIANSYAH

Benar, Yang Mulia.

388. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pihak Terkait, silakan. Waktunya sama Ibu.

389. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: ADEL LAYDE LEONARD

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan kami untuk membacakan keterangan Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 3 terhadap Perkara Nomor 66/PHP.BUP-XIX/2021.

Yang pertama dalam eksepsi dianggap dibacakan. Selanjutnya di dalam pokok perkara.

390. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Mana yang krusial yang mau ditanggapi yang pokok permohonan.

391. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: ADEL LAYDE LEONARD

Di poin 17, Yang Mulia.

392. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bacakan.

393. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: ADEL LAYDE LEONARD

Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 373 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 19.00 WITA, menyebutkan bahwa perolehan suara Nomor Urut 1 sebesar 13.144 suara, perolehan suara Paslon Nomor Urut 2 sebesar 9.757 suara, dan perolehan suara Paslon Nomor Urut 3 sebesar 19.807 suara.

Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, perbedaan suara antara Paslon Nomor Urut 3, yakni Pihak Terkait dan Paslon Nomor Urut 2 selaku Pemohon sebesar 10.050 suara. Atau (...)

394. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, sudah melampaui ambang batas.

**395. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021:
ADEL LAYDE LEONARD**

Siap, Yang Mulia.

396. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kenapa ini dimasukkan di pokok, bukan di eksepsi, Ibu?

**397. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021:
ADEL LAYDE LEONARD**

Di dalam eksepsi juga ada, Yang Mulia.

398. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya kenapa diangkat lagi di dalil pokok permohonan? Soal melampaui ambang batas itu syarat formil apa pokok permohonan itu? Nah, Anda itu sebagai Lawyer harus tahu itu.

**399. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021:
ADEL LAYDE LEONARD**

Siap, Yang Mulia.

400. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, kan?

**401. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021:
ADEL LAYDE LEONARD**

Siap, Yang Mulia.

402. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu untuk bagian dari kedudukan hukum mestinya. Ya, enggak apa-apa, silakan yang lain, ditanggapi yang lain?

**403. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021:
ADEL LAYDE LEONARD**

Selanjutnya bahwa Pemohon tidak menguraikan berapa banyak perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Dengan demikian,

berapakah sesungguhnya persentase dan/atau angka kemenangan Pemohon.

404. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, itu sudah dianggap dibacakan. Dalil yang lain, yang Ibu mau tanggapi lagi yang mana?

405. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: ADEL LAYDE LEONARD

Yang ingin ditambahkan.

406. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Poin berapa?

407. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: ADEL LAYDE LEONARD

Ada poin yang ke-20.

408. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Silakan.

409. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: ADEL LAYDE LEONARD

Bahwa menurut Pihak Terkait justru Pemohon telah melakukan pendidikan politik yang tidak baik bagi masyarakat, yaitu yang pertama pemasangan baliho yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Malinau. Vide PT-5.

Yang berikut, Pemohon pernah dilaporkan, telah melakukan dugaan money politics yang dilakukan sehari sebelum pencoblosan. Vide PT-6.

Selanjutnya, Petitum, sebagaimana uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam pokok perkara. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau Nomor 373/HK.03.1/Kpt/03/6502/KPU-Mal/7/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malinau Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, pukul 19.00 WITA.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

410. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih juga. Sebelum saya kembalikan ke Pak Ketua Panel, ada yang mau ditanyakan? Pemohon ada pertanyaan? Cukup. Termohon?

411. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: IMAMUL MUTTAQIN

Cukup, Yang Mulia.

412. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Cukup. Bawaslu, cukup? Pihak Terkait, cukup? Baik. Itu Pak Ketua mungkin ada klarifikasi dari Pak Daniel atau Pak Ketua, silakan.

413. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya ingin klarifikasi ke Termohon. Dalam jawaban Termohon pada halaman 13 poin 4.4 bantahan tentang (ucapan tidak terdengar jelas) sampul kertas yang memuat Model D itu, ini pertanyaan saya adalah apakah ini terjadi di semua kecamatan, ya? Artinya, di seluruh pelaksanaan itu sama? Atau hanya terjadi di tempat ini saja, yang soal amplop khusus?

414. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: IMAMUL MUTTAQIN

Mohon izin, Majelis, Yang Mulia?

415. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, silakan.

416. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: IMAMUL MUTTAQIN

Pihak Prinsipal yang akan menjelaskan secara lebih detailnya.

417. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, silakan. Ya, di sini saja.

418. TERMOHON NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: INDRA GUNAWAN

Baik, Yang Mulia. Dari catatan kami, itu ada 7 amplop yang di ... diapa ... di ... menggunakan amplop, sementara ada 7 yang menggunakan plastik yang disegel dan satu menggunakan map. Nah, untuk map yang dimaksud dengan map berlogo, kami memang mencetak map ... amplop itu hanya untuk yang di pemungutan di TPS, sementara untuk di kecamatan itu tidak ada spesifikasi khusus yang untuk itu karena yang memang dibutuhkan itu hanya satu amplop untuk satu kecamatan, untuk satu pemilihan, yang dibutuhkan, sehingga kami hanya menyiapkan hanya amplop saja, amplop biasa yang warna coklat itu untuk itu.

419. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Berarti sama untuk seluruh kecamatan, ya?

420. TERMOHON NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: INDRA GUNAWAN

Ya, sama.

421. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia.

422. KETUA: ASWANTO

Baik, cukup, Yang Mulia? Baik, terima kasih. Sebelum kita sahkan bukti, saya mau tanya ke KPU dulu. Berapa DPT sih setiap TPS, Pak? Yang Prinsipal saja. Berapa pemilih di setiap TPS anu ... DPT di setiap TPS? Maksimal.

423. TERMOHON PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: INDRA GUNAWAN

Maksimal 400, Pak.

424. KETUA: ASWANTO

Maksimal 400, ya.

425. TERMOHON PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: INDRA GUNAWAN

Sedangkan paling rendahnya ada yang 40, 1 TPS.

426. KETUA: ASWANTO

400, ya, paling tinggi 400, ya?

427. TERMOHON PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: INDRA GUNAWAN

Ya.

428. KETUA: ASWANTO

Kemudian jumlah kertas suara?

429. TERMOHON PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: INDRA GUNAWAN

Ya, Pak?

430. KETUA: ASWANTO

Jumlah kertas suara?

431. TERMOHON PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: INDRA GUNAWAN

Surat suaranya adalah 50.682, kita (...)

432. KETUA: ASWANTO

Enggak, enggak misalnya TPS-nya 400.

433. TERMOHON PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: INDRA GUNAWAN

Ya.

434. KETUA: ASWANTO

Berapa kertas suara yang dikirim ke TPS itu?

435. TERMOHON PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: INDRA GUNAWAN

Ditambah 2,5%, Pak.

436. KETUA: ASWANTO

Tambah 2,5%. Jadi kalau 400 berapa 2,5%-nya itu?

437. TERMOHON PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: INDRA GUNAWAN

2,5% dari 4 berarti 10, ya.

438. KETUA: ASWANTO

Ya.

439. TERMOHON PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: INDRA GUNAWAN

10 berarti 410.

440. KETUA: ASWANTO

Berapa?

441. TERMOHON PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: INDRA GUNAWAN

410.

442. KETUA: ASWANTO

Masa 410. Kurang lebih 8 apa 9, ya.

443. TERMOHON PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: INDRA GUNAWAN

Ya, itu.

444. KETUA: ASWANTO

Oke. Baik, kita sahkan bukti dulu untuk Termohon ada T-1 sampai dengan T-11, Pak, ya.

445. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: IMAMUL MUTTAQIN

Betul, Yang Mulia.

446. KETUA: ASWANTO

Betul, ya, kita sudah periksa, lengkap.

KETUK PALU 1X

Kemudian Pihak Terkait, ini tidak memasukkan bukti, ya?

447. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: ADEL LAYDE LEONARD

Siap, Yang Mulia. Ya, yang aslinya itu yang legesnya asli masih dalam perjalanan pengiriman dari Malino ke Jakarta, Yang Mulia.

448. KETUA: ASWANTO

Oh, gitu.

449. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: ADEL LAYDE LEONARD

Paling lambat hari Senin akan dimasukkan.

450. KETUA: ASWANTO

Berarti kita belum bisa sahkan, ya, karena ini yang Anda majukan fotokopian.

451. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: ADEL LAYDE LEONARD

Siap, Yang Mulia.

452. KETUA: ASWANTO

Tanpa asli dan tidak dileges juga, ya.

453. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: ADEL LAYDE LEONARD

Yang fotokopiannya itu sudah dileges, Yang Mulia.

454. KETUA: ASWANTO

Ya, tapi kita minta yang aslinya, ya.

455. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: ADEL LAYDE LEONARD

Siap, Yang Mulia.

456. KETUA: ASWANTO

Ya. Belum bisa disahkan alat buktinya Pihak Terkait. Kemudian Bawaslu sebagai pemberi keterangan ada PK-1 sampai dengan PK-25, ya.

457. BAWASLU PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: DONNY

Benar, Yang Mulia.

458. KETUA: ASWANTO

Nah, ada yang tidak ada bukti fisiknya PK-2, ya. Kemudian Bawaslu ini daftar alat bukti juga belum, ya. Kurang, kurang, ya. Masih ada kekurangan daftar alat buktinya nanti dilengkapi, Pak, ya.

459. BAWASLU PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: DONNY

Siap, Yang Mulia.

460. KETUA: ASWANTO

Ya, kita sahkan yang PK-1, PK-3, sampai PK-25. PK-2, kita tidak sahkan.

KETUK PALU 1X

Baik, terima kasih untuk semua pihak. Pemohon, Termohon, Bawaslu, dan Pihak Terkait untuk 2 Perkara Nomor 49/PHP.BUP-XIX/2021 dan 66/PHP.BUP-XIX/2021, selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.05 WIB

Jakarta, 5 Februari 2021

Panitera,
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

